

DISKURSUS TENTANG KONSEP DEMOKRASI, PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Rahmatullah¹, Nurhakim²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: rahmatkuliahyes2s@gmail.com

ABSTRACT

Elections are one of the most well-known forms of public participation in democracies. The success of elections also depends on transparency, integrity, and fairness. Elections should be held in an atmosphere free from fraud, corruption, or intervention. This study aims to determine the level of public participation in the electoral process in developing countries, and what are the factors that influence it and the impact of corruption, unhealthy political practices, and political culture on the integrity of elections in developing countries, with case studies in specific countries. In this research stage, literature review is carried out with a systematic approach, by referring to various sources available in various research databases. In order to realize fair, transparent, and credible elections in developing countries, there needs to be a concerted effort from governments, civil society, and international institutions. By maintaining electoral integrity and increasing public participation, developing countries can strengthen their democratic systems and ensure that people's voices are truly represented in the political process.

Keywords: Democracy, Political Participation, Elections

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling terkenal dalam demokrasi. Keberhasilan pemilihan umum juga bergantung pada transparansi, integritas, dan keadilan. Pemilihan umum harus diadakan dalam suasana yang bebas dari penipuan, korupsi, atau intervensi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum di negara berkembang, dan apa faktor-faktor yang memengaruhinya dan dampak korupsi, praktik politik yang tidak sehat, dan budaya politik terhadap integritas pemilihan umum di negara berkembang, dengan studi kasus di negara tertentu. Dalam tahap penelitian ini, kajian literatur dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, dengan merujuk kepada berbagai sumber yang tersedia dalam berbagai basis data penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang adil, transparan, dan kredibel di negara berkembang, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional. Dengan menjaga integritas pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, negara berkembang dapat memperkuat sistem demokrasi mereka dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam proses politik.

Kata Kunci: *Demokrasi, Partisipasi Politik, Pemilihan Umum.*

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai demokrasi sudah dilakukan sejak era Yunani Kuno, di mana publik saat itu dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan negara (Haliim, 2016). Pada era modern, demokrasi semakin berlangsung secara *indirect*, karena suara public direpresentasikan oleh wakil rakyat di lembaga parlemen melalui proses electoral (Al Hidayat, 2018). Rasionalisasi hal tersebut terjadi karena wilayah yang semakin meluas dan penambahan penduduk yang semakin massif. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai demokrasi, partisipasi dan pemilu tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berdasarkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik menjadi inti dari sistem demokratis, dan salah satu bentuk partisipasi utama adalah melalui pemilihan umum (Prasojo, 2003). Pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk memilih perwakilan mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan (Asshiddiqie, 2006). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada penurunan partisipasi politik di berbagai negara demokratis (Wibowo et al., 2020). Fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk tingkat partisipasi rendah dalam pemilihan umum, kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan politik, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga demokratis (Efriza, 2019).

Fenomena tersebut terkait dengan kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, atau bahkan isu ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi dan pendidikan politik. Mempelajari faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana memperbaiki partisipasi politik dan menjaga kesehatan demokrasi. Dalam konteks pemilihan umum, juga penting untuk memahami dampak dari sistem pemilihan, apakah sistem representatif, proporsional, atau campuran, terhadap partisipasi politik dan akuntabilitas pemerintah. Pertanyaan tentang kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum dan adanya hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi masyarakat dalam proses ini perlu diteliti lebih lanjut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat fondasi demokrasi di masa depan.

Konsep demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Ini berarti rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi sering dijelaskan sebagai

pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, otoritas pemerintah berasal dari warga negara dan dijalankan sesuai dengan kehendak mereka. Partisipasi masyarakat adalah elemen sentral dalam sistem demokrasi. Hal ini mencakup keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aspek politik, seperti pemilihan umum, pemilihan wakil rakyat, dan pengambilan keputusan (Mulyadi, 2019). Partisipasi masyarakat berperan penting dalam menjaga integritas demokrasi, memastikan akuntabilitas pemerintah, dan memungkinkan suara rakyat didengar dalam proses politik. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, demokrasi dapat menjadi hampa dan kehilangan maknanya.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling terkenal dalam demokrasi. Dalam pemilihan umum, warga negara memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Proses pemilihan umum ini memungkinkan rakyat untuk memilih pemerintahan yang mereka anggap akan mewakili dan mengemban kepentingan mereka dengan baik. Pemilihan umum juga memungkinkan rakyat untuk mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dan mengekspresikan preferensi politik mereka (Gunawan, 2019). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum mencakup tidak hanya hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk terlibat dalam berbagai tahap pemilihan, termasuk pencalonan, kampanye, dan pemantauan pemilihan. Hal ini penting dalam menjaga proses pemilihan umum yang adil dan demokratis. Partisipasi masyarakat juga dapat melibatkan diskusi politik, berkontribusi pada perdebatan kebijakan, dan mendukung organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan kepentingan warga negara.

Keberhasilan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangat bergantung pada sejumlah faktor. Pertama, demokrasi memerlukan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Ini adalah prasyarat untuk partisipasi masyarakat yang bebas dan adil dalam proses politik. Kedua, pendidikan politik dan kesadaran politik adalah faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Semakin warga negara teredukasi tentang isu-isu politik dan pentingnya hak suara mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menurut (Hayyun, 2021) Selanjutnya, akses yang adil dan setara ke pemilihan umum adalah aspek penting dalam memastikan partisipasi masyarakat yang adil. Tindakan diskriminasi, hambatan ekonomi, atau kendala geografis dapat menghalangi beberapa kelompok masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang memfasilitasi partisipasi semua warga negara tanpa diskriminasi. Demokrasi dan partisipasi masyarakat adalah konsep yang

melintasi batas negara dan budaya. Mereka menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas politik, mencegah konflik, dan mempromosikan perdamaian. Kedua konsep ini juga terus berkembang dan berubah seiring waktu, mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan aspirasi politik mereka (Ubaidillah & Asy'ari, 2021).

Pemilihan umum adalah aspek sentral dalam sistem demokrasi yang memainkan peran kunci dalam menjalankan prinsip "pemerintahan oleh rakyat." Ini adalah proses di mana warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk memilih para pemimpin mereka serta mengatur arah kebijakan pemerintah. Pemilihan umum adalah sarana utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka, membuatnya menjadi salah satu elemen terpenting dalam sebuah negara demokratis. Dalam demokrasi representatif, pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk memilih wakil-wakil yang akan mewakili kepentingan mereka di lembaga-lembaga legislatif atau eksekutif. Para pemimpin yang terpilih ini akan menjadi suara rakyat dalam pembuatan kebijakan, membuat undang-undang, dan mengawasi jalannya pemerintahan (Fadillah et al., 2022). Oleh karena itu, pemilihan umum menciptakan hubungan antara wakil dan warga negara, yang merupakan dasar bagi sistem demokratis.

Pemilihan umum juga memungkinkan warga negara untuk mengontrol para pemimpin mereka. Dengan memberikan hak suara kepada rakyat, para pemimpin yang terpilih memiliki kewajiban untuk mendengarkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Warga negara memiliki hak untuk menghentikan pemimpin yang tidak memenuhi harapan mereka melalui pemilihan berikutnya (T. Hidayat, 2023). Oleh karena itu, pemilihan umum memberikan mekanisme akuntabilitas yang kuat dalam demokrasi. Selain itu, pemilihan umum mempromosikan pengambilan keputusan yang inklusif. Ini memungkinkan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang, keyakinan, dan pandangan yang beragam untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilihan umum memberikan platform di mana perbedaan politik dan sosial dapat diungkapkan dan diatasi dengan damai. Dengan begitu, pemilihan umum membantu dalam mencegah konflik dan menjaga stabilitas politik dalam masyarakat. Menurut (Deviana & Nurani, 2019) Proses pemilihan umum juga memberikan warga negara kesempatan untuk memilih pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi mereka. Dalam sebuah demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin yang berkomitmen pada isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, atau lingkungan. Pemilihan umum memungkinkan rakyat untuk memengaruhi arah dan prioritas pemerintah dengan suara mereka.

Keberhasilan pemilihan umum juga bergantung pada transparansi, integritas, dan keadilan. Pemilihan umum harus diadakan dalam suasana yang bebas dari penipuan, korupsi, atau intervensi. Ini berarti bahwa proses pemilihan harus terbuka untuk pemantauan publik dan harus dilaksanakan secara adil. Hambatan seperti pemilihan gerrymandering, pembatasan hak suara, atau praktik politik yang merugikan harus diatasi untuk memastikan pemilihan umum yang sah (Sorik, 2019). Dalam konteks negara berkembang, pemilihan umum memiliki peran yang lebih besar dalam perjalanan politik dan perkembangan demokrasi. Pemilihan umum sering kali menjadi tonggak penting dalam sejarah negara-negara ini, mengarah pada perubahan pemerintahan, reformasi, atau transformasi politik. Oleh karena itu, pemilihan umum di negara berkembang sering dianggap sebagai salah satu momen penting dalam membangun dan memperkuat demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan panggung di mana berbagai pihak politik bersaing dan mengartikulasikan visi mereka untuk negara. Ini menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan warga negara beragam pilihan dalam memilih pemimpin dan partai politik yang mencerminkan nilai-nilai mereka. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengukuhkan visi politik dan arah kebijakan.

Perkembangan demokrasi di negara-negara berkembang telah menjadi pusat perhatian dan pembahasan selama beberapa dekade terakhir. Sejarah perkembangan demokrasi di negara-negara berkembang seringkali berawal dari periode paska-kolonialisme. Banyak negara yang baru saja meraih kemerdekaan dari pemerintahan kolonial pada pertengahan abad ke-20, dan dengan itu muncul kesempatan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, perjalanan menuju demokrasi sering kali penuh tantangan (Hanna et al., 2022). Tantangan utama dalam perkembangan demokrasi di negara berkembang adalah menciptakan institusi yang kuat dan efisien untuk mendukung sistem demokratis. Seringkali, lembaga-lembaga ini terbebani oleh warisan kolonial yang memungkinkan korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan. Proses pendemokratisasi mengharuskan pembentukan sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik atau ekonomi yang merugikan.

Ketidakstabilan politik juga merupakan salah satu tantangan besar dalam perkembangan demokrasi di negara-negara berkembang. Konflik politik, ketidakstabilan pemerintahan, dan seringnya pergantian kekuasaan dapat menghambat pembangunan sistem demokratis yang kokoh. Pengalaman politik yang bergejolak dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kepercayaan pada institusi demokratis. Selain itu, masalah ekonomi sering menjadi hambatan dalam perkembangan demokrasi. Menurut (Cholisin, 2015)

Ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan yang meluas, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat membatasi partisipasi politik masyarakat. Pengembangan demokrasi yang efektif memerlukan kondisi ekonomi yang stabil dan inklusif. Namun, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, terdapat juga pencapaian dalam perkembangan demokrasi di negara-negara berkembang. Banyak negara telah berhasil mengadopsi konstitusi yang demokratis, memastikan pemilihan umum yang teratur, dan membentuk lembaga-lembaga independen seperti badan pemilihan. Partisipasi politik masyarakat telah meningkat seiring waktu, dengan warga negara yang semakin aktif dalam pemilihan umum dan berpartisipasi dalam gerakan sosial yang mendukung perubahan politik.

Selain itu, peran media dan teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam memajukan demokrasi di negara-negara berkembang. Akses yang lebih luas ke informasi dan komunikasi telah membantu masyarakat untuk lebih memahami isu-isu politik, mengawasi tindakan pemerintah, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Media sosial, misalnya, telah memberikan platform bagi warga negara untuk berbicara tentang isu-isu politik dan mengorganisir gerakan social (Kaban, 2000). Penting juga untuk mencatat bahwa setiap negara berkembang memiliki konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda, sehingga perkembangan demokrasi tidak dapat diukur dengan ukuran yang sama. Setiap negara memiliki tantangan dan peluangnya sendiri dalam perjalanan menuju demokrasi yang kokoh. Meskipun ada kemajuan, perjalanan ini sering kali dipenuhi dengan rintangan dan ketidakpastian. Perkembangan demokrasi di negara-negara berkembang adalah proses yang berkelanjutan dan tidak ada jaminan keberhasilan (Irawan, 2006). Namun, penting untuk mengakui upaya yang telah dilakukan dan memberikan dukungan dalam membangun masyarakat yang partisipatif, lembaga-lembaga yang kuat, dan sistem politik yang inklusif. Demokrasi yang stabil dan kuat memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara, dan oleh karena itu merupakan tujuan yang patut diperjuangkan dalam negara-negara berkembang.

Masalah partisipasi masyarakat di negara berkembang melibatkan sejumlah kendala yang mempengaruhi tingkat keterlibatan warga negara dalam proses pemilihan umum. Salah satu masalah utama adalah akses terhadap pendidikan yang memadai. Banyak masyarakat di negara berkembang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Kurangnya pendidikan dapat menghambat pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi politik dan hak-hak politik mereka. Ini seringkali menjadi hambatan untuk memahami proses pemilihan umum, calon-calon, dan isu-isu politik yang sedang berkembang. Kendala ekonomi juga merupakan masalah serius dalam partisipasi masyarakat di negara berkembang. Bagi

banyak warga negara, masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan ekonomi menghabiskan banyak waktu dan upaya, yang dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk terlibat dalam proses politik. Kebutuhan dasar seperti mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga menjadi prioritas utama, dan hal ini dapat mengabaikan partisipasi aktif dalam pemilihan umum.

Aspek budaya juga berperan dalam kendala partisipasi masyarakat. Beberapa budaya mungkin memiliki tradisi partisipasi politik yang lemah atau norma yang menghambat wanita atau kelompok minoritas untuk terlibat dalam politik. Budaya juga dapat mempengaruhi pandangan terhadap isu-isu politik dan pemilihan calon-calon. Budaya partisipatif harus ditingkatkan dan dihormati untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Tantangan politik juga merupakan faktor yang signifikan dalam masalah partisipasi masyarakat (Fadillah et al., 2022). Masyarakat di beberapa negara berkembang mungkin merasa ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik dan proses pemilihan umum karena sejarah korupsi, ketidakstabilan politik, atau ketidaksetaraan yang terus berlanjut. Ini bisa menghambat dorongan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, tindakan represif atau ancaman terhadap aktivis politik dan masyarakat sipil juga dapat menjadi faktor penekan partisipasi. Penting untuk memahami bahwa masalah partisipasi masyarakat di negara berkembang bersifat kompleks dan seringkali saling terkait. Untuk meningkatkan partisipasi, perlu ada pendekatan yang holistik yang mengatasi masalah ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik (T. Hidayat, 2023). Melalui upaya yang tepat, seperti meningkatkan akses pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan membangun kesadaran partisipatif, masyarakat di negara berkembang dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan berkontribusi pada perkembangan demokrasi yang lebih kuat.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang terbesar di dunia, dengan populasi yang besar dan beragam. Negara ini telah mengalami perkembangan demokrasi yang signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Proses demokratisasi di Indonesia telah menghasilkan pemilu-pemilu yang relatif terbuka dan kompetitif. Pemilihan umum di Indonesia melibatkan pemilihan presiden, anggota parlemen, serta pemimpin lokal di tingkat provinsi dan kabupaten. Proses pemilihan ini melibatkan jutaan pemilih dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Indonesia memiliki sistem pemilihan langsung, yang berarti bahwa warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, baik pada tingkat nasional maupun local (Pane, 2022). Namun, meskipun demokrasi telah mengakar di Indonesia, masih ada sejumlah masalah dan tantangan yang perlu

diatasi dalam pemilihan umum. Salah satu masalahnya adalah isu partisipasi masyarakat. Meskipun pemilihan umum secara teori adalah hak setiap warga negara, masih ada banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mereka, terutama di tingkat pemilihan lokal. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang proses pemilihan, ketidakpedulian politik, dan hambatan ekonomi masih mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Selain itu, isu korupsi dan praktek politik yang tidak sehat juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Praktek korupsi dalam pemilihan umum, termasuk penyalahgunaan dana kampanye dan suap, dapat mengganggu integritas pemilu. Selain itu, kampanye yang kurang berbasis isu dan lebih bersifat populis juga dapat memengaruhi kualitas pemilihan umum. Budaya politik Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan (Cholisin, 2015). Budaya patronase, di mana pemilih diharapkan untuk mendukung kandidat dengan harapan mendapatkan imbalan, masih ada di beberapa wilayah. Hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum di negara berkembang, dan apa faktor-faktor yang memengaruhinya dan dampak korupsi, praktik politik yang tidak sehat, dan budaya politik terhadap integritas pemilihan umum di negara berkembang, dengan studi kasus di negara tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam tahap penelitian ini, kajian literatur dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, dengan merujuk kepada berbagai sumber yang tersedia dalam berbagai basis data penelitian. Proses seleksi literatur dilakukan dengan cermat dan memperhatikan langkah-langkah yang terperinci, mengikuti jejak pencarian yang luas melalui berbagai basis data yang relevan. Salah satu sumber yang digunakan adalah *Google Scholar*. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan, yang terkait erat dengan pertanyaan penelitian yang tengah diinvestigasi.

Dalam proses ini, langkah awal melibatkan penentuan kata kunci yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Kemudian, pencarian literatur dilaksanakan dengan cermat, memastikan bahwa sumber-sumber yang diambil berasal dari database yang kredibel dan relevan dengan bidang penelitian ini. Pencarian mencakup sejumlah sumber yang melibatkan artikel ilmiah, buku, jurnal, dan publikasi lainnya yang berfokus pada media sosial dan promosi. Dalam upaya menjaga kualitas dan relevansi, proses seleksi melibatkan analisis yang ketat terhadap setiap sumber yang ditemukan.

Selama tahap ini, penulis juga melakukan proses evaluasi terhadap setiap sumber yang telah ditemukan untuk memastikan bahwa literatur yang

digunakan dalam penelitian ini berkualitas tinggi dan mendukung kerangka konseptual penelitian. Keseluruhan metode pencarian literatur ini dilaksanakan secara teliti dan sistematis untuk memastikan bahwa landasan teoritis penelitian ini kokoh dan relevan. Bagian ini memuat langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian, disajikan secara lengkap namun padat. Kalau melakukan pendataan harus dijelaskan mulai dari metoda pengambilan sampel sampai dengan teknik analisis.

Proses seleksi artikel mengikuti pedoman dari *Preferred Reporting Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA)* dan terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal melibatkan pencarian artikel, dan pada tahap ini, jumlah artikel yang ditemukan dalam periode tahun 2020-2023 adalah sebanyak 25 artikel. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap screening, di mana artikel-artikel ini dianalisis lebih lanjut. Setelah proses *screening*, sebanyak 7 artikel dipilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas artikel, di mana setiap artikel diperiksa untuk memastikan keandalan dan kualitasnya. Hasil dari tahap evaluasi ini adalah bahwa 7 artikel memenuhi syarat dan layak disertakan dalam laporan akhir kajian dari pustaka. Ini mencerminkan proses seleksi artikel yang ketat dan sistematis sesuai dengan panduan PRISMA.

Peneliti menjalankan proses pengambilan keputusan terkait artikel yang ditemukan berkenaan dengan isu penelitian ini, serta melakukan identifikasi dari setiap artikel yang terdapat dalam setiap database yang diakses. Berdasarkan artikel-artikel tersebut, dilakukan tinjauan mendalam terkait isu kecerdasan buatan dan dasar hukum yang menjadi landasan.

Tabel 1. Taksonomi Konsep Demokrasi, Partisipasi dan Pemilu

Judul dan Peneliti	Tujuan	Hasil
Pendidikan Politik: Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya (Husna & Fahrimal, 2021)	Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan informasi, memotivasi, dan menumbuhkan kesadaran pemilih pemula.	Hasil pelaksanaan kegiatan ini berguna sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap partisipatif pemilih pemula. Melalui kegiatan ini pemilih pemula didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya sehingga kesadaran terkait hak politik, proses demokrasi, dan partisipasi masyarakat

		dapat ditingkatkan.
Urgensi Pendidikan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Prabowo, 2023)	Pendidikan demokrasi adalah sebuah upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.	Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi dapat membantu menjaga stabilitas politik. Dalam sistem demokrasi, keputusan dibuat melalui proses politik yang transparan dan adil.
Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi “Sehat” (Hidayah et al., 2022)	Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara.	Hasil kajian mengungkapkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami pasang surut sejak era kemerdekaan hingga reformasi kini. Pelaksanaan demokrasi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila merupakan tantangan pelaksanaan demokrasi bagi Indonesia kini.
Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial (Mahendra, 2021)	Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kualitas demokrasi di Indonesia pada periode 2014-2019. Untuk mengelaborasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan demokrasi prosedural dan demokrasi substansial.	Hasilnya, ditemukan bahwa secara prosedural Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi-institusi penunjang demokrasi, yang ditandai oleh adanya pemilu terbuka dan partisipasi universal.
Demokrasi Damai Di Era Digital (Andriani, 2022)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta demokrasi di ranah digital beserta berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam menciptakan demokrasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran kabar bohong (hoax) dan ujaran kebencian adalah tantangan utama yang dihadapi dalam menciptakan demokrasi

	damai di era digital.	damai di era digital karena dapat mengancam demokrasi dan mengarah kepada disintegrasi bangsa.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Indriany, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan (2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara	Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat, diantaranya: (1) Keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya di TPS meningkat jadi 76,08%. Namun, banyak yang memilih untuk tidak terlibat menjadi penyelenggara pemilu, sehingga tidak bisa berpartisipasi pada proses penyusunan regulasi dan evaluasi pemilu.
Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019 (Mulyadi, 2019)	Tulisan ini membahas mengenai mengapa partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu kali ini mengalami peningkatan, berbeda dengan periode-periode sebelumnya, dan apa implikasinya bagi perwujudan demokrasi di Indonesia.	Peran media sosial, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, Parpol, Caleg dan calon perwakilan daerah, serta daya pikat pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2019 merupakan faktor yang berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemilu

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilu nasional, regional, dan lokal, merupakan elemen penting dalam menganalisis kesehatan demokrasi di suatu negara. Tingkat partisipasi masyarakat mencerminkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik dan berpartisipasi dalam menentukan perwakilan dan pemimpin mereka (Andriani, 2022). Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Salah satu metode yang paling umum adalah pengukuran tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Hal ini mencakup persentase jumlah pemilih terdaftar yang benar-benar memilih dalam pemilu. Pengukuran ini memberikan gambaran langsung tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam pemilihan. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat partisipasi pemilih dapat bervariasi tergantung pada jenis pemilu dan tingkat pemerintahan. Misalnya, pemilu nasional mungkin memiliki tingkat partisipasi yang berbeda dari pemilu lokal.

Selain partisipasi pemilih, partisipasi dalam pemilihan umum juga dapat diukur melalui tingkat partisipasi calon politik. Ini mencakup jumlah calon yang mengajukan diri dalam pemilihan dan kompetisi yang mereka hadapi. Tingkat persaingan dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik dengan cara yang lebih aktif, seperti menjadi calon. Menurut (Indriany, 2020) Pengukuran partisipasi masyarakat juga dapat mencakup tingkat partisipasi dalam pemilihan lokal dan regional. Terlalu sering, fokus diberikan pada pemilu nasional, sementara pemilu lokal dan regional juga memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pemilihan lokal dan regional dapat memengaruhi kebijakan dan keputusan yang lebih langsung memengaruhi komunitas mereka. Selain itu, pengukuran partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga mencakup partisipasi dalam pemilihan yang bersifat konsultatif atau referendum. Tingkat partisipasi dalam pemilihan seperti ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam keputusan yang lebih spesifik atau berorientasi pada isu tertentu.

Peran media dan teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum di negara berkembang sangat signifikan. Media dan teknologi informasi modern telah mengubah lanskap politik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan akses yang lebih cepat terhadap informasi politik (Mulyadi, 2019). Untuk mengukur partisipasi masyarakat secara komprehensif, perlu menggabungkan berbagai metode pengukuran ini dan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik di negara yang bersangkutan. Data ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum, dan apakah ada

faktor-faktor tertentu yang memengaruhi tingkat partisipasi. Dengan demikian, pengukuran partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah alat penting dalam mengevaluasi kesehatan demokrasi di suatu negara dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Media cetak, siaran berita, situs web berita, dan platform media sosial memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi politik. Masyarakat dapat dengan cepat memahami isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan, membandingkan calon dan partai, serta mendapatkan wawasan tentang proses pemilihan. Kampanye politik yang menggunakan media sosial dan situs web kampanye memungkinkan calon dan partai untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Mereka dapat menyebarkan pesan kampanye, mengorganisir acara, dan mendengarkan masukan dari masyarakat (Gunawan, 2019). Ini memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kampanye politik. Media sosial dan forum online menyediakan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik. Masyarakat dapat mengemukakan pendapat, bertukar ide, dan berdebat tentang isu-isu terkait pemilihan umum. Ini memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dalam dialog politik. Media dan teknologi informasi dapat digunakan untuk pendidikan politik. Masyarakat dapat mengakses materi pendidikan politik, diskusi, atau debat yang membantu mereka memahami proses pemilihan, sistem politik, dan isu-isu politik yang terkait.

Proses pemilihan umum adalah elemen sentral dalam sistem demokrasi di seluruh dunia. Ini adalah mekanisme di mana rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dan memengaruhi arah pemerintahan. Dalam negara berkembang, pemilihan umum sering kali dihadapkan pada sejumlah tantangan dan faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum* (Hayyun, 2021). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum mencerminkan keterlibatan warga negara dalam proses politik. Partisipasi ini dapat diukur melalui partisipasi dalam pemungutan suara, kampanye politik, kampanye sosial, dan aksi politik lainnya. Tingkat partisipasi yang tinggi penting untuk menjaga legitimasi pemerintah dan sistem demokrasi. Namun, di negara berkembang, tingkat partisipasi masyarakat seringkali mengalami variasi yang signifikan.

Tingkat pendidikan adalah faktor penting yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Warga negara dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terlibat dalam proses politik. Mereka memiliki akses yang lebih baik ke informasi politik dan lebih mampu memahami isu-isu yang diperdebatkan. Faktor ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, juga memainkan peran penting dalam tingkat partisipasi. Warga negara yang hidup

dalam kemiskinan ekstrem mungkin tidak memiliki sumber daya untuk terlibat dalam pemilihan umum. Mereka mungkin terlalu fokus pada masalah ekonomi sehari-hari mereka (Ubaidillah & Asy'ari, 2021). Akses yang lebih besar ke informasi politik dan berita saat ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Teknologi, seperti internet dan media sosial, telah memungkinkan akses yang lebih besar ke informasi politik. Namun, di negara berkembang, akses tersebut masih terbatas untuk beberapa kelompok.

Budaya politik suatu negara berperan dalam menentukan tingkat partisipasi. Jika budaya politik menghargai keterlibatan politik aktif, maka partisipasi masyarakat kemungkinan akan lebih tinggi. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih apatis terhadap politik, partisipasi mungkin lebih rendah. Korupsi adalah masalah serius yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Korupsi dapat mencakup suap, penyelewengan dana kampanye, dan praktik korup lainnya yang merusak integritas pemilihan. Ketika masyarakat melihat adanya korupsi dalam pemilihan umum, mereka mungkin meragukan keberhasilan proses tersebut. Ini dapat mengurangi motivasi untuk berpartisipasi (Fadillah et al., 2022). Korupsi dalam pemilihan umum dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses dan pengaruh politik. Calon yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar mungkin memiliki keunggulan dalam kampanye, yang menghambat persaingan yang adil. Pemilihan yang dicemari oleh korupsi kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Warga negara mungkin merasa bahwa proses tersebut tidak mewakili kepentingan mereka.

Integritas pemilihan umum adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan demokrasi di negara berkembang. Namun, beberapa faktor, seperti korupsi, praktik politik yang tidak sehat, dan budaya politik, dapat mengancam integritas pemilihan umum. Praktik politik seperti kampanye negatif yang penuh serangan dan retorika negatif dapat memicu ketidakpuasan dan polarisasi di kalangan pemilih (T. Hidayat, 2023). Ini dapat merusak integritas pemilihan dengan memengaruhi pemilihan berdasarkan emosi dan perasaan daripada isu-isu kebijakan. Politik dinasti, di mana keluarga politik memegang kekuasaan, dapat merusak persaingan politik yang adil dan menghambat integritas pemilihan. Masyarakat mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan yang sebenarnya. Ancaman, intimidasi, atau tindakan represif terhadap pemilih atau oposisi politik dapat menciptakan atmosfer ketakutan dan mengekang partisipasi masyarakat yang bebas dan terbuka. Ini dapat mengancam integritas pemilihan dengan membuat pemilih merasa terancam.

Analisis praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, kampanye negatif, dan intimidasi pemilih, sangat penting untuk memahami dampaknya

terhadap integritas pemilihan umum di negara berkembang. Politik uang adalah praktik di mana kandidat atau partai politik menggunakan uang atau sumber daya finansial untuk memengaruhi hasil pemilihan. Hal ini sering terjadi dalam bentuk penawaran hadiah uang kepada pemilih, pembelian suara, atau penggunaan sumber daya finansial yang tidak wajar untuk kampanye politik. Menurut (Deviana & Nurani, 2019) Praktik politik uang dapat merusak integritas pemilihan dengan mengorbankan prinsip dasar demokrasi, di mana pemilih seharusnya memilih berdasarkan keyakinan politik, bukan imbalan finansial. Kampanye politik yang dilakukan dengan cara menyerang pesaing dengan cara yang tidak fair atau bersifat merendahkan (kampanye negatif) dapat meracuni proses pemilihan. Praktik ini seringkali melibatkan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan tentang lawan politik, dengan tujuan untuk merusak reputasi mereka. Kampanye negatif dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial yang seharusnya menjadi fokus pemilihan, sehingga pemilih dapat terjebak dalam retorika negatif.

Intimidasi pemilih adalah praktik di mana pemilih diancam atau diberikan tekanan agar memilih atau tidak memilih calon tertentu. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk ancaman fisik, ancaman pekerjaan, atau ancaman sosial. Intimidasi pemilih dapat menciptakan lingkungan pemilihan yang tidak aman dan membatasi kebebasan pemilih untuk memilih berdasarkan keyakinan mereka (Asih et al., 2021). Korupsi dalam politik, terutama ketika terlibat pejabat publik atau kandidat, dapat merusak integritas pemilihan. Korupsi dapat memengaruhi proses pemilihan dengan memberikan keuntungan finansial atau sumber daya kepada kandidat yang korup. Ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan pemilihan umum. Pemerintah yang tidak netral dan menggunakan sumber daya negara untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu juga dapat merusak integritas pemilihan. Hal ini dapat mencakup penggunaan birokrasi, media negara, atau sumber daya keuangan negara untuk kepentingan politik, yang menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik.

Pemalsuan hasil pemilu, termasuk manipulasi perhitungan suara atau pemalsuan dokumen pemilihan, merupakan praktik yang sangat merusak integritas pemilu. Hal ini dapat menghasilkan hasil yang tidak mencerminkan pilihan sebenarnya dari pemilih dan merampas hak suara warga Negara (Fadillah et al., 2022). Praktik politik yang tidak sehat ini dapat mengancam integritas pemilihan umum, melemahkan sistem demokrasi, dan merusak kepercayaan masyarakat pada proses politik. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk mengatasi praktik-praktik ini melalui reformasi politik, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang tegas. Hanya dengan menjaga proses pemilihan yang bersih dan adil, masyarakat dapat

merasa yakin bahwa pilihan mereka memiliki dampak dan bahwa pemilihan benar-benar mewakili suara rakyat.

KESIMPULAN

Dalam konteks negara berkembang, integritas pemilihan umum dan partisipasi masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi. Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk tingkat pendidikan, faktor ekonomi, akses terhadap informasi politik, dan budaya politik. Tingkat partisipasi pemilih dan partisipasi calon politik adalah indikator penting dalam mengukur keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Namun, banyak negara berkembang menghadapi tantangan dalam menjaga integritas pemilihan umum. Korupsi, praktik politik yang tidak sehat, dan budaya politik yang kurang mendukung dapat mengancam integritas pemilihan. Praktik politik uang, kampanye negatif, dan intimidasi pemilih dapat merusak proses pemilihan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan pengaruh politik. Korupsi politik juga dapat merusak kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan.

Pemalsuan hasil pemilu merupakan ancaman serius terhadap integritas pemilihan umum. Manipulasi perhitungan suara dan pemalsuan dokumen pemilihan dapat menghasilkan hasil yang tidak mencerminkan pilihan sebenarnya dari pemilih, dan ini dapat merampas hak suara warga negara. Untuk menjaga integritas pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, langkah-langkah penting termasuk reformasi politik, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik yang tidak sehat. Selain itu, pendidikan politik, akses yang lebih besar ke informasi politik melalui media dan teknologi informasi, serta perubahan dalam budaya politik juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang adil, transparan, dan kredibel di negara berkembang, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional. Dengan menjaga integritas pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, negara berkembang dapat memperkuat sistem demokrasi mereka dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hidayat, N. (2018). Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Langsung Dalam Demokrasi Pancasila Di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp1-7>
- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>
- Asih, E. W., Ode, L., Rain, R., Pohandry, A., Industri, T., & Industri, T. (2021). Analisis Pengendalian Kualitas Produk Teh Hitam dengan Pendekatan Lean-Six Sigma Method di PT. Teh XY. *Journal of Industrial and Engineering System*, 2(2).
- Asshiddiqie, J. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 6–27. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK_Volume3nomor4Desember2006.pdf#page=164
- Cholisin, C. (2015). Dinamika LSM Di Indonesia dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Demokrasi. *Informasi*, 26(1). <https://doi.org/10.21831/informasi.v1i1.6752>
- Deviana, N., & Nurani, F. (2019). Pelaksanaan Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi. *Blog. Ub.Ac.Id*.
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica*, 10(1), 17–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Fadillah, A., Fadhilah, N., Sabila, F., Kurniawan, R., & Fazira, W. (2022). Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi saat Terselenggaranya Pemilu. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4). <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i4.1035>
- Gunawan, W. (2019). Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu. *Jurnal Academia Praja*, 2(02). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.118>
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19–30.
- Hanna, A., Rauf, M., Siregar, R., & Djafar, M. (2022). Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Hayyun, N. A. S. (2021). Penataan Sistem Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat. In *Jurnal OSF Preprints*.
- Hidayah, Y., Ulfa, N., & Belladonna, P. (2022). Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi “Sehat.” *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2).
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024. EDua Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada

- Masyarakat, 3(1). <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>
- Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Pendidikan Politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 3(1).
- Indriany, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Irawan, B. B. (2006). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Perspektif*, 5(3).
- Kaban, R. (2000). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Perspektif*, 5(3). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i3.243>
- Lincoln, A. (n.d.). Nama : Antonius Oktavianus Nim : 2111B0038 Email : fianaye20@gmail.com Abstrak.
- Mahendra, Y. I. (2021). Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1).
- Mulyadi, M. (2019). Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019. *Puslit*, IX(09).
- Pane, R. M. (2022). Pendekatan Strategi Mind Mapping Dalam Pelajaran Sejarah Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Education & Learning*, 2(1). <https://doi.org/10.57251/el.v2i1.229>
- Prabowo, N. (2023). Urgensi Pendidikan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.311>
- Prasojo, E. (2003). People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 10–24.
- Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1). <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.773>
- Ubaidillah, I., & Asy'ari, H. (2021). Relasi Antara Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilu. *Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, 3(01).
- Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 152. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>